

EKSISTENSI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Ihwan Ridwan

Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani KM 6
Ihwanridwan891.ir@gmail.com

Abstrak

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam mengembangkan potensi masyarakat dan memberdayakan masyarakat. PKBM yang merupakan bagian dari satuan pendidikan nonformal menekankan proses pembelajaran andragogi. PKBM di era globalisasi menjadi titik rawan dalam persaingan pendidikan jika tidak ada inovasi yang dikembangkan. PKBM harus lebih jeli melihat peluang dalam menghadapi tantangan global sehingga tetap eksis dalam pembangunan pendidikan. Tulisan ini merupakan kajian literatur yang berangkat dari refleksi kritis tentang: 1) PKBM memanfaatkan sumber daya lokal dalam pemberdayaan masyarakat yang kemudian dirancang dalam sebuah program. 2) Melihat eksistensi PKBM dalam pembangunan pendidikan. PKBM yang memanfaatkan sumber daya lokal sebagai peluang dalam mengorganisir masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dianggap mampu memberikan *outcome* bagi perubahan di dalam diri masyarakat sehingga taraf ekonominya terus meningkat. Selain itu, PKBM untuk menjaga eksistensinya dalam pembangunan pendidikan dibutuhkan daya kreatifitas dan inovatif dari pengelola PKBM sehingga PKBM tidak terlihat monoton dan membosankan. PKBM yang dapat eksis dan terus berkembang, tidak terlepas dari strategi yang digunakan. Salah satu strategi yang digunakan agar program PKBM bisa terukur adalah menggunakan SIM. PKBM yang menggunakan SIM mampu eksis pembangunan pendidikan.

Kata Kunci; Eksistensi PKBM, Sumber Daya Lokal, SIM, Pembangunan Pendidikan

Abstract

Community learning center is society institutions engaged in developing the potential and society empowerment. Society learning center is part of unit non-formal education emphasize in andragogy learning. Community learning center in globalization be focus prone to competition of education if there is no innovation that in developed. Community learning center should more see opportunities in global challenges for keep exist in development of education. This article is the study literature departing from reflection about: 1) Community learning center resources utilization localized in society development and designed in a program. 2) See existence of community learning center in education development. Community learning center who use local resources in to organize the society to actively participate in the implementation of the program are able to give outcome for change in the society so the economic situation can be much better. In other side, community learning center to maintain their existence in education development needed power creativity and innovative of community learning center management so not seen flat and boring. Community learning center that can be exist and continued to grow, cannot be separated of strategy used. One strategy used that the program of community learning center can measurable is use SIM. The community learning center uses SIM are maintain exist in education development.

Key word; Existence of Community Learning Center, Local resources, SIM, education development.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam kehidupan manusia, tanpa adanya pendidikan maka akan terjadi kebodohan dan ketimpangan sosial. Melalui pendidikan, masyarakat mampu menambah pengetahuan,

mengasah keterampilan, dan mendapatkan norma-norma sosial dalam pergaulan, sehingga terwujud tatanan sosial yang adil dan sejahtera. Pendidikan dipandang perlu untuk dijadikan nomor satu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab dengan adanya

pendidikan maka manusia dengan mudah mengaktualiskan diri dalam kehidupan sehari-hari (Nurhalim, 2011)

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dijadikannya jalur pendidikan nonformal sebagai pengganti, penambah dan pelengkap bagi pendidikan formal agar terwujud pendidikan sepanjang hayat (UU nomor 20 tahun 2003). Tindak lanjut dari upaya pemerintah membentuk jalur pendidikan nonformal menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran dan putus sekolah. Bukan hanya itu, berbicara pendidikan nonformal sungguh sangat kompleks, sebab pendidikan nonformal harus matang secara konsep, teori, terlebih aktualisasinya. Konsep pendidikan nonformal dibentuk menjadi sebuah lembaga nonformal, yakni PKBM.

PKBM memiliki banyak program-program yang mutakhir sehingga sangat sering menjadi bahan kajian. Pengkajian tentang PKBM berkembang sejalan dengan pembangunan pendidikan. PKBM dianggap seksi untuk dikaji karena menjadi garapan yang dianggap mampu memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan sepanjang hayat.

Melalui PKBM, pemerhati pendidikan nonformal dapat menampung dan memberikan pengajaran bagi warga masyarakat, agar tercipta masyarakat yang produktif. PKBM yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat tentu memiliki andil dan peran penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Selain itu, PKBM dapat pula menjadi wadah pembelajaran bagi warga masyarakat agar mampu mendapatkan pengetahuan baru dan keterampilan baru sehingga PKBM tidak hanya sebagai ajang berkumpul tetapi memiliki manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi (Iskandar, 2007: 911).

PKBM yang banyak hadir ditengah-tengah masyarakat dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya bagi masalah keterampilan. Di berbagai daerah, PKBM dianggap sebagai tempat mencari ilmu dan mengasah keterampilan namun yang menjadi persoalan ketika PKBM tidak mampu menghadapi persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat maka akan muncul stigma negatif tentang PKBM, terlebih ketika PKBM hanya mampu bergerak ketika mendapatkan kucuran

anggaran, hal ini sering terjadi di beberapa daerah, sehingga muncul kebijakan tentang akreditasi lembaga nonformal sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal.

Jumlah PKBM di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 10.551 PKBM, hal ini berdasar dari data dirjen PAUD-DIKMAS. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah PKBM di Indonesia sudah sangat banyak, namun PKBM yang mampu bertahan masih sangat sedikit bahkan perlu meningkatkan kualitasnya dalam pembangunan pendidikan. PKBM yang berperan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat harus mampu melihat potensi lokal yang ada dilingkungannya sehingga dapat dikembangkan secara bersama-sama. Sumber daya yang ada di setiap daerah tentu berbeda-beda sehingga dibutuhkan kurikulum yang bersifat kontekstual. Selain itu, model pengembangan PKBM yang bernuansa lokal harus terus dikembangkan sehingga PKBM betul-betul menjadi pusat belajar (*learning centre*). Kebanyakan PKBM yang baru hadir berupaya untuk menyamaratakan kurikulum tanpa mengembangkan model yang sesuai dengan konteks masalah sosial. Sehingga, PKBM yang dirintis secara bersama mengalami masalah internal, yaitu pengelolaan yang kurang maksimal, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang, dan tidak adanya strategi yang dibuat agar PKBM merasa dibutuhkan oleh masyarakat.

Barometer PKBM yang berhasil dan dapat dijadikan sebagai contoh ketika: 1) sistem pengelolanya baik, 2) pendataannya lengkap, 3) sumber daya manusia berkualitas, dan 4) memiliki dukungan dari masyarakat. Sistem pengelolaan tentu membutuhkan strategi agar PKBM dapat bertahan sehingga tidak ada lagi istilah PKBM "siluman". Strategi pengembangan PKBM dapat dilakukan dengan cara memberikan layanan pendidikan agar masyarakat dapat diberdayakan dan menggali potensinya (suryono, 2014). 2) pendataan yang lengkap perlu dilakukan agar pengelola PKBM dapat mengetahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Jika data yang dimiliki "palus" maka PKBM yang dirintis secara bersama keluar dari ruh sejatinya karena tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga oleh, dari dan untuk masyarakat. 3) Sumberdaya manusia berkualitas, kualitas dapat

dibagi menjadi dua a) kualitas pengelola dan b) kualitas masyarakat. Kualitas pengelola menjadi penting diperhatikan untuk menjaga mutu sehingga kualitas program yang akan dijalankan berkualitas pula, programnya berkualitas dan masyarakatnya akan berkualitas pula. Dengan menanamkan akhlak, pengetahuan, dan keterampilan maka masyarakat akan merasa puas dengan kehadiran PKBM. 4) memiliki dukungan dari masyarakat, dukungan masyarakat merupakan *legitimasi informal* yang terbangun dari kesepakatan masyarakat. Oleh karena itu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, pendekatan kekeluargaan sangat tepat, apalagi PKBM yang berdiri berada di pedesaan yang memiliki tingkat partisipasi tinggi.

PKBM yang bernuansa lokal dapat berkebang sesuai dengan tuntutan zaman. PKBM saat ini memiliki posisi yang baik dalam melakukan gerakan sosial. Sebab PKBM telah menjadi satuan pendidikan nonformal, keuntungannya adalah PKBM memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola lembaganya sesuai dengan kebutuhan.

Perlu diperhatikan bahwa untuk menjaga eksistensi PKBM agar ikut andil dalam pembangunan pendidikan, yaitu: 1) tahap pengembangan konsep; pada tahap pengembangan konsep, pengelola PKBM memiliki gagasan tentang bentuk pelayanan kepada masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat. 2) tahap rintisan; pada tahap rintisan pengelola PKBM membuat komitmen dengan masyarakat terkait dengan program yang akan dikembangkan dan sarana belajar sudah disiapkan kemudian dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya. 3) tahap pematapan; hasil analisis dari kelemahan dan kekuatan sudah didiskusikan secara bersama sehingga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman. 4) tahap penyebarluasan artinya program-program PKBM sudah siap untuk dilaksanakan sebagai alat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. 5) tahap pembinaan artinya program yang sudah dijalankan dianalisis kemudian diperbaiki dan dijalankan secara berkelanjutan. 6) tahap pemandirian artinya masyarakat sudah mampu mengelola programnya tanpa ada pendampingan dari PKBM (Sihombing, 2001:5).

Pembentukan PKBM sejalan dengan konsep pemberdayaan dengan pendidikan luar sekolah yang memanfaatkan sumber daya lokal.

Sangat banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat jika PKBM difungsikan sebagai lembaga untuk memberdayakan masyarakat, sebab PKBM dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Hikmat (2010) menyatakan bahwa: konsep pemberdayaan masyarakat melalui PKBM dapat mewujudkan: kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan.

PKBM sebagai lembaga yang didirikan oleh masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya posisi pendidikan nonformal. PKBM yang merupakan representasi dari pemerintah bersama-sama membangun masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal, yang bertujuan untuk menumbuhkan masyarakat belajar (*learning society*) sehingga tercipta masyarakat yang produktif, mandiri, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Strategi yang dirancang oleh PKBM biasanya bersifat monoton, tidak ada inovasi, sehingga dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat kurang maksimal. Strategi dalam mengelola PKBM dibutuhkan sistem informasi manajemen (SIM) sehingga tercipta keterpaduan antara pemanfaatan sumber daya lokal dengan pengelolaan menggunakan SIM. Jika keduanya telah berkolaborasi, maka akan tercipta pula suasana belajar yang kondusif dan program yang dijalankan akan berkelanjutan.

SIM dalam pendidikan luar sekolah harus memiliki batasan tertentu sehingga dalam proses pembelajaran, masyarakat akan lebih mudah memahami. Sistem Informasi Di PKBM menekankan pada sistem informasi dalam mengelola data, baik data warga belajar maupun data yang dapat membantu PKBM tetap eksis. Sistem informasi PKBM merupakan prosedur yang dijalankan untuk memudahkan merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengarsipkan, memelihara dan penyelenggaraan program-program PKBM kedepannya (Sihombing, 2000: 190).

SIM menjadi bagian yang terintegrasi dengan program-program pendidikan luar sekolah, dengan adanya SIM maka program yang dijalankan akan lebih terkelola dengan baik. Perencanaan program misalnya, jika tidak ada SIM yang mengatur maka perencanaan program tidak akan ada capaian yang akan diukur. Pelaksanaan juga membutuhkan SIM agar dapat mengurangi kesalahan selama program berjalan. Manfaat lain dari SIM untuk merancang

program lebih terukur adalah: 1) Penyusunan rencana program; program yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan tidak dapat terkoordinir antara masyarakat dengan pengelola program karena tidak adanya data yang memuat hasil identifikasi. 2) Penyusunan laporan kemajuan; menggunakan SIM akan lebih memudahkan pengelola, program yang telah berjalan akan dibuatkan analisis SWOT sehingga memiliki tindak lanjut program. 3) Penyusunan peta sasaran PKBM; peta sasaran PKBM menjadi penting untuk memaksimalkan pelaksanaan program di PKBM, pada bagian ini pengelola dapat memanfaatkan sumber daya lokal sebagai pemantik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan akses pendidikan dalam mengembangkan dan memajukan sumber daya lokalnya, baik di wilayah pertanian maupun pesisir, tujuannya agar dapat bernilai ekonomis. 4) penyusunan strategi pelaksanaan program; memungkinkan SIM berperan penting dalam pelaksanaan program sehingga dari tahap perencanaan sudah terhubung dengan pelaksanaan sampai hasil program dan 5) pengembangan SDM di PKBM; pengembangan SDM perlu dilakukan bagi PKBM, termasuk bagi penanaman pemahaman SIM bagi pengelola PKBM. Sehingga, PKBM bisa bertahan dan eksis dalam pembangunan Pendidikan.

FOKUS KAJIAN

Dalam upaya membangun eksistensi PKBM yang berbasis sumber daya lokal dibutuhkan analisis mendalam baik dari pihak akademis maupun praktisi. Sudah banyak PKBM yang bermunculan ditengah-tengah masyarakat namun lebih banyak lagi yang tidak berfungsi. Faktor yang menyebabkan PKBM tidak dapat bertahan, 1) Pengelola PKBM tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam merancang program-program sehingga mengabaikan potensi sumber daya lokal, 2) PKBM belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan, 3) Tidak mengfungsikan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan PKBM sehingga program yang dijalankan tidak terukur dan 4) Kurangnya tenaga (alumni PLS) yang berkeinginan untuk merintis PKBM sehingga orang-orang yang menjalankan PLS masih kurang memahami konsep dasar PLS.

Berdasarkan point yang dijabarkan, maka yang menjadi fokus kajian adalah:

1. Bagaimana PKBM berbasis Sumber Daya Lokal?
2. Bagaimana Eksistensi PKBM dalam pembangunan pendidikan?
Mengacu pada fokus kajian, maka yang menjadi tujuan pengkajian adalah:
 1. Mengkaji PKBM berbasis Sumber Daya Lokal?
 2. Mengkaji Eksistensi PKBM dalam pembangunan pendidikan?

PEMBAHASAN

Konsep PKBM

PKBM memainkan peran dalam pembangunan pendidikan, bukan hanya di Indonesia, dinegara lainpun PKBM tetap dibutuhkan oleh masyarakat. seperti Jepang, Thailand, Iran, bahkan Amerika PKBM memiliki peran sentral dalam mewujudkan *life long educationa*. Jika di Indonesia namanya adalah PKBM maka di di Jepang dikenal dengan sebutan KOMINKAN (*Community Cultural Learning Centre*) atau biasa disebut sebagai (*Citizens' Public Halls*) (Kamil, 2011: 136). Di Thailand, Irak, Amerika disebut sebagai CLC (*Community Learning Centre*). Istilah penamaan lembaga tentu berbeda beda, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yang menjadi menarik adalah lembaga masyarakat tersebut sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu: 1) memberdayakan masyarakat, 2) meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, 3) memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan 4) memberikan kemandirian bagi masyarakat.

Konsep PKBM mengacu pada pembangunan pendidikan, menganalisis kebutuhan masyarakat yang memiliki peran penting untuk memberikan wadah kepada masyarakat dalam menggali potensi di lingkungan yang mengacu pada CBE (*Community Based Education*) merupakan landasan berpijak PKBM karena menekankan pada pemberdayaan (*empowermen*) berbasis lingkungan sosial.

PKBM yang mengacu pada CBE menekankan perlunya analisis situasi pada aspek kondisi sosial memiliki manfaat dalam mendukung atau membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan pendidikan (Kathmandu et al, 2006). Oleh sebab itu, PKBM yang memiliki peran ideal dalam memberikan

penanamn nilai-nilai sosial kepada masyarakat sehingga terjadi proses pembelajaran bagi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal.

PKBM yang berbasis sumber daya lokal dalam mengembangkan program-program yang komprehensif, maka perlu dilakukan (*need assesment*) agar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga dampak dari program PKBM dapat dirasakan oleh masyarakat, berikut lima point yang perlu diperhatikan bagi pengelola PKBM: 1) mengorganisir rancangan strategis PKBM yang berbasis sumber daya lokal, 2) memperhatikan kebutuhan masyarakat agar program berjalan efektif, 3) pengembangan sumber daya manusia pada pengelola PKBM sehingga PKBM tidak hanya sekedar memperhatikan kuantitas pengurus tetapi lebih kepada kualitas, 4) perubahan persepsi masyarakat tentang PKBM harus diantisipasi dengan merancang program yang sesuai kebutuhan masyarakat, bukan karena keinginan pengelola PKBM, dan 5) Menerapkan model pengembangan PKBM yang inovatif agar PKBM tidak terlihat monoton (Zolfaghari, 2009).

Keberhasilan PKBM dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat melibatkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di PKBM, jika PKBM menggunakan pendekatan desentralisasi maka PKBM tersebut bisa berjalan dengan baik karena menggunakan kekuatan dari bawah (masyarakat) bukan mengandalkan kebijakan dari atas (pemerintah). Hal ini menjadi perhatian pula bagi (Dwiningrum, 2011) desentralisasi pendidikan hadir sebagai agenda global dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan secara merata dan bersifat kontekstual sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

PKBM Berbasis Sumber Daya Lokal

Telah disinggung sebelumnya bahwa pendekatan desentralisasi sangat tepat dalam mengembangkan PKBM, baik PKBM yang ada dipertanian maupun yang ada dipedesaan. Pendekatan desentralisasi menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat, masyarakat sebagai penentu dalam proses pembelajaran di PKBM sehingga tercipta *sense of belong*. Masyarakat yang notabeneanya sebagai bagian dari pemilik kepentingan dalam memberdayakan merupakan hal yang sangat penting untuk didukung melalui

program-program kemasyarakatan melalui PKBM.

Karakteristik PKBM yang bermutu dan dapat eksis dalam pembangunan pendidikan harus menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya lokal, sehingga terjadi sinergitas antara pengelola PKBM dengan masyarakat, sama halnya yang ditegaskan oleh (Stoll, et al 2006) karakteristik PKBM harus memperhatikan hal berikut: 1) nilai yang tercipta di PKBM harus ditanamkan secara bersama oleh masyarakat sebab visi yang dibentuk bukan sepihak (hanya untuk pengelola) melainkan visi yang dibentuk melibatkan masyarakat, 2) jika nilai dan visi sudah dibentuk secara bersama, maka rasa tanggung jawab bersama akan terbangun dan 3) PKBM yang memanfaatkan sumber daya lokal tidak mengabaikan aspek nilai-nilai sosial dengan perkembangan zaman. Sehingga, jika dalam PKBM memanfaatkan sumber daya lokal maka yang harus dibangun adalah mengkolaborasi dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang terus bergerak bisa menjadi peluang bagi PKBM untuk merancangnyanya dalam bentuk program yang mutakhir.

PKBM yang merupakan *center point* bagi masarakat harus terlihat nyaman dan suasana disesuaikan dengan kondisi sosial geografis sehingga masyarakat tidak merasa canggung untuk melakukan aktifitas pembelajaran di PKBM. Tolak ukur PKBM yang mampu menggalang suruh aspek kehidupan masyarakat agar terlihat nyaman harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan sehingga apapun yang ingin dikembangkan oleh masyarakat dapat ditemui di PKBM. Namun, yang menjadi persoalan tidak semua PKBM memperhatikan seluruh aspek tersebut, sangat banyak alasan jika ada pertanyaan mengenai pengembangan PKBM yang sangat sempit. PKBM seringkali memandang bahwa aspek yang penting disentuh adalah hanya aspek pendidikan karena jika pendidikan ditanamkan kepada masyarakat maka aspek lainnya akan ikut, mengapa demikian karena ada dua faktor, *pertama* karena PKBM tidak melihat kondisi sosial masyarakat, dan *kedua* karena PKBM masih bergatung dengan anggaran pemerintah sehingga program yang dijalankan hanya program pendidikan. Sejatinnya, PKBM menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia.

PKBM yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat merupakan penunjang dalam keberhasilan kebijakan. PKBM dapat dikatakan berhasil apabila mencapai tiga hal: 1) mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui program-program yang mengacu pada potensi lokal, 2) melakukan *need assessment* sebelum dan setelah program dijalankan dan 3) memiliki komunikasi yang baik dalam menghubungkan antara warga masyarakat dengan swasta yang memiliki dana CSR (*Corporation Social Responsibility*), sehingga melalui PKBM kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Tiga indikator tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi pengelola dalam mengembangkan PKBM agar bisa lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Program-Program PKBM yang Berbasis Sumber Daya Lokal

PKBM sebagai lembaga yang bergerak dalam pelayanan masyarakat harus merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga program-program yang dirancang tidak hanya sebatas perencanaan tetapi dapat dilaksanakan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Program-program PKBM yang mutakhir, tepatguna dan tepat sasaran telah diatur oleh UU No 81 tahun 2013 pasal 4 bahwa program PKBM terdiri dari: “1) Pendidikan Anak Usia Dini, 2) Pendidikan Keaksaraan, 3) Pendidikan Kesetaraan, 4) Pemberdayaan Perempuan, 5) Pendidikan Kecakapan Hidup, 6) Pendidikan Kepemudaan, 7) Pendidikan Keterampilan Kerja, dan 8) Pengembangan budaya baca. Jika dilihat aturan main tentang program yang dimuat dalam UU sudah dapat menyentuh aspek kehidupan masyarakat, baik yang dipedesaan maupun diperkotaan.

Program yang dirancang oleh PKBM tidak mesti menjalankan delapan program, yang terpenting adalah progres dan efektifitas program yang dijalankan. PKBM yang berfungsi sebagai wadah dalam menampung seluruh kegiatan belajar masyarakat (Diana dan Lilik, 2016).

Sasaran program PKBM yang berorientasi pada pemberdayaan sudah menjadi ruh dari pendidikan nonformal. PKBM yang programnya menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari anak usia dini, remaja, hingga orang dewasa dapat ditampung di PKBM. PKBM yang terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat lebih memiliki

tanggung jawab bersama, rasa tanggung jawab yang ditanamkan kepada masyarakat akan memberikan efek positif bagi perkembangan PKBM. Bahkan dalam realitasnya, tindak lanjut program PKBM dapat berjalan ketika proses belajar masyarakat sudah tertanam. Sehingga masyarakat tidak hanya berpikir pada aspek keterampilannya tetapi lebih kepada *outcome* dari program. Salah satu *Outcome* program berupa peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Pembelajaran dalam program PKBM tidak hanya sampai pada hasil dari program tetapi sampai kemampuan berwirausaha. Yang trend dibicarakan dalam dunia pendidikan nonformal adalah kewirausahaan sosial (*social entrepreneur*), menjadi pekerjaan rumah bagi praktisi ataupun akademisi ketika aspek kewirausahaan sosial ditanamkan kepada warga masyarakat. Kesiapan warga masyarakat menghadapi tantangan global, terlebih ketika disepakati APEC (*Asean-Pasific Economic Cooperation*) yang merupakan kerjasama antar negara dalam menumbuhkan perekonomian di Asean.

Peluang bagi praktisi pendidikan ketika PKBM yang merupakan salah satu dari satuan pendidikan nonformal ikut terlibat bahkan memberikan dampak ekonomi di tatanan masyarakat. Ketika ekonomi asean dibentuk maka PKBM harus merancang program yang sesuai dengan tuntutan zaman. Telah disinggung sebelumnya bahwa kewirausahaan sosial menjadi pekerjaan rumah bagi praktisi maupun akademisi, masyarakat yang berada dipelosok mampu menangkap peluang tersebut bagi yang dapat mengembangkan sumber daya lokal dan dapat dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun mancanegara. Ketika kewirausahaan sosial bangkit ditengah-tengah masyarakat maka sebesar apapun gejolak ekonomi global, sumber daya lokal tetaplah berdiri dan memutar roda perekonomiannya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Masyarakat dipandang sebagai objek kajian yang harus diselesaikan masalahnya oleh pemerintah atau lembaga pendidikan lainnya. Padahal jika kita melihat peran serta masyarakat, masyarakat memiliki peran dalam pembangunan pendidikan, sebelumnya telah dijelaskan bahwa PKBM rintisan masyarakat sendiri yang mendapatkan dukungan dari masyarakat dan

pemerintah. Sehingga bukan hanya pemerintah yang dapat berperan dalam pembangunan pendidikan, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting. Dipertegas oleh (Onyenemezu, 2014) bahwa masyarakat ketika dilibatkan dari perencanaan sampai dampak program, maka akan merasa dibutuhkan dan membutuhkan (simbiosis mutualisme) dan warga masyarakat akan merasa bahagiaian dengan keterlibatan tersebut.

PKBM yang memanfaatkan sumber daya lokal akan lebih mudah berkembang, aspek lain yang perlu ditanamkan PKBM yang berbasis sumber daya lokal agar masyarakat partisipatif mengikuti program-program adalah aspek pembelajaran. Pembelajaran sangat perlu diperhatikan sebagai pemantik agar PKBM merasa dibutuhkan bagi masyarakat. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan andragogi merupakan pendekatan tepat sasaran karena di PKBM lebih dipenuhi oleh orang dewasa dan program-programnya pun lebih menitikberatkan pada orang dewasa.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program di PKBM dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya: 1) partisipasi perencanaan; partisipasi perencanaan merupakan strategi PKBM untuk melibatkan masyarakat dalam merencanakan program yang akan dijalankan, ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan maka tingkat partisipasinya untuk mengikuti kegiatan akan lebih meningkat karena sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan akan pemanfaatan sumber daya lokal. 2) partisipasi pelaksanaan; partisipasi pelaksanaan dimaksudkan adalah tingkat partisipasi masyarakat mengikuti program-program di PKBM. 3) partisipasi evaluasi; partisipasi evaluasi merupakan bentuk evaluasi masyarakat dan pengelola PKBM untuk melihat kelemahan dan tantangan yang akan dihadapi selajutnya (Hermawan dan Suryono, 2016).

Potensi sumber daya lokal disetiap daerah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi PKBM. Jika PKBM menggunakan strategi yang tepat maka sumber daya lokal akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan sumber daya lokal dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan. Misalnya, kegiatan pendidikan dan pelatihan, PKBM merancang program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di daerah pertanian,

memberikan pelatihan pembuatan pupuk atau sejenisnya, di daerah pesisir pelatihan pembuatan abon ikan atau sejenisnya. Melihat kondisi sosial, maka PKBM dapat terlibat dimanapun dan kapanpun, jagan berpangku tangan terhadap kucuran dana pemerintah. Sebab PKBM sejatinya mengedepankan pemberdayaan dibandingkan keuntungan sepihak.

Menjadi sebuah tantangan bagi PKBM jika tingkat partisipasi masyarakat sangat kurang, perlu adanya evaluasi sehingga PKBM dapat berjalan tanpa adanya istilah PKBM yang “mati suri”. PKBM yang mengedepankan pemberdayaan akan memperhatikan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang kurang partisipatif terhadap keberadaan PKBM harus memiliki strategi agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat, ada lima strategi agar tingkat partisipasi belajar di PKBM meningkat, 1) identifikasi; identifikasi dilakukan agar mengetahui kebutuhan masyarakat, ada dua cara agar mengetahui kebutuhan masyarakat: a) menganalisis jenis pekerjaannya yang digelutinya, jika pekerjaannya sudah diketahui barulah masuk pada keterampilan yang diinginkan dan b) mengetahui kebutuhan pasar, kebutuhan pasar tentu sangat penting karena keterampilan yang diberikan akan berdampak ekonomis bagi kehidupan masyarakat. 2) Pembinaan tenaga pengelola; pembinaan bagi pengelola sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi *human error* dalam pelaksanaan program di PKBM. program yang bersumber dari sumber daya lokal harus dikelola dengan tepatguna sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi antara masyarakat dengan pengelola PKBM. 3) Penyebaran informasi; penyebaran informasi menjadi hal penting dalam mempromosikan PKBM, namun yang perlu diperhatikan adalah informasi tentang sumber daya lokal yang akan dikelola oleh PKBM. 4) Terpadu dan lintas sektoral; program-program PKBM yang sudah direncanakan berdasarkan potensi sumber daya lokal harus bersifat terpadu sehingga dampak program dapat dirasakan oleh masyarakat, ketika masyarakat merasakan dampaknya maka partisipasi masyarakat akan meningkat dan 5) Menciptakan suasana kekeluargaan; strategi ini tepat digunakan dalam menggali dukungan dari masyarakat, menanamkan sisi kekeluargaan yang terbangun melalui ikatan emosional, maka akan memudahkan pengelola PKBM untuk

menjalankan program-programnya. (Sihombing, 2001).

PKBM Dimata Dunia

(CLC) *Community Learning Center* merupakan lembaga sejenis PKBM namun CLC sering digunakan di luar Negeri. CLC memiliki peran yang sama dengan PKBM yaitu memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan ataupun yang ingin menambah pengetahuan dan keterampilan.

CLC dipandang perlu dan tidak dapat dihilangkan karena ragam metode dan kegiatan sosial yang diakomodir. CLC dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang membutuhkannya layanan informasi, pengembangan sumber daya, transformasi pengetahuan, dan kesejahteraan sosial.

Banyak ragam yang dilakukan oleh negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang dalam menerapkan CLC, tergantung dari konteks masalah dan kebutuhan masyarakat. Di Cina disebut sebagai *Rural Community Learning Center*, sasarannya memfokuskan di pedesaan.

CLC di negara lain memiliki peran yang sama di Indonesia, namun CLC di negara lain memiliki konteks masalah yang berbedad-beda sehingga penyelesaiannya akan berbeda pula, begitupun dengan posisi CLC. Tujuan besarnya adalah memberikan pemerataan akses pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu dijangkau oleh pemerintah.

CLC pada prinsipnya atas dasar mewujudkan *life long learning* dengan maksud agar masyarakat dapat berdaya dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Pada prinsipnya CLC memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena memiliki dukungan langsung dari masyarakat sehingga dalam melaksanakan sebuah program akan berjalan dengan lancar (UNESCO, 2007).

Tidak kalah menarik model CLC di Jepang yang dikenal dengan Kominkan (*Community Cultural and Learning Center*) yang bertujuan memberikan bekal pendidikan melalui pelatihan yang merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap korban perang. Jepang memang dikenal dengan kemajuan pendidikannya, namun dibalik keberhasilannya akar rumputnya adalah didirikannya Kominkan sebagai lembaga belajar masyarakat dalam membangun kesadaran

pentingnya pengetahuan, pentingnya keterampilan, dan pentingnya etika dalam menjaga kebudayaan Jepang.

Tujuan dari Kominkan selain memberikan pemberdayaan kepada korban perang pada zaman perang dunia II, namun ketika perang dunia berakhir, posisi Kominkan masih berdiri tegak, berjalan menyisir kebodohan dan ketidakberdayaan, ada dua tujuan dari kominkan setelah perang dunia II, yaitu: a) menanamkan nilai-nilai demokratis secara partisipatif dalam membangun pendidikan, b) menyusun program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya program pendidikan orang dewasa (*adult education*) (Mustofa Kamil, 2011).

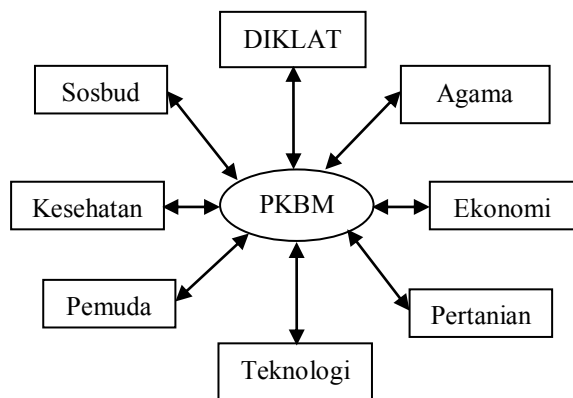
PKBM Berbasis SIM dalam Pembangunan Pendidikan

PKBM yang berhasil ketika mampu mengkombinasikan antara sistem informasi manajemen (SIM) dengan kondisi sosial sehingga tercipta proses pembelajaran yang ideal. Ketika PKBM memanfaatkan SIM sebagai sistem pengelolaan program, maka bukan hanya perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dapat diukur, melainkan dampak program juga dapat diukur.

Salah satu tantangan terbesar bagi PKBM dalam menghadapi dunia pendidikan adalah tidak adanya sistem yang mengatur, sehingga dalam tata pelaksanaan, pengelolaan, dan pengadministrasian masih terbilang lemah. Padahal jika kita melihat negara lain, CLC memanfaatkan sistem informasi manajemen sebagai pendukung pelaksanaan program yang berkelanjutan, program yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan menanamkan aspek kewirausahaan kepada warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Menurut (Hadromi, 2017) mengatakan bahwa kemampuan manajerial program dapat dikembangkan agar program yang dijalankan dapat berdampak ekonomis bagi warga masyarakat.

Untuk menjaga ekistensi PKBM, sehingga PKBM merasa dibutuhkan bagi masyarakat dan memberikan dampak pendidikan kepada masyarakat tentu harus menampung, mengakomodir kebutuhan masyarakat. PKBM sebagai lembaga dalam pembangunan pendidikan tidak hanya

menyentuh aspek pendidikan, melainkan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. aspek sosial/budaya misalnya, PKBM yang merupakan lembaga bentukan masyarakat dapat menjadikan PKBM sebagai media untuk mengekspos kearifan lokal sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. PKBM sebagai inti atau sumber dari kegiatan masyarakat yang dijalankan oleh masyarakat. Seperti yang digambarkan oleh (Kamil, 2011: 86).



Gambar 1 PKBM sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan.

PKBM menjadi pusat yang menyinari masyarakat disekitarnya, sehingga muncul aspek-aspek lain yang disepakati oleh masyarakat untuk dikaji dan dikembangkan di PKBM. Dengan mengklasifikasikan delapan aspek tersebut maka menjadi tugas bersama antara pengelola PKBM dengan masyarakat. Jika masyarakat tidak menanamkan kepercayaan kepada pengelola PKBM maka akan terjadi kesalahan komunikasi yang berujung pada pembubaran PKBM, namun jika terbangun kepercayaan dan tanggung jawab maka akan banyak muncul kebutuhan masyarakat yang perlu diajarkan di PKBM.

Pengelolaan PKBM yang efektif agar pondasinya tetap kokoh dan dapat bertahan lama sehingga dapat ikut andil dalam pembangunan pendidikan dengan menggunakan SIM. SIM dianggap perlu dalam pendidikan formal. Lalu bagaimana pendidikan nonformal? Selama ini pendidikan nonformal dalam hal ini PKBM mengabaikan SIM yang merupakan system pengelolaan yang penting bagi keberlanjutan PKBM. SIM dianggap perlu dalam pengelolaan PKBM untuk perencanaan strategis, perencanaan operasional, taktis, dan penyelenggaraan (Sihombing, 2000: 190).

Pengelolaan PKBM yang berbasis SIM tentu memberikan keuntungan bagi PKBM dan masyarakat karena berlandaskan pada data yang sesuai di lapangan. SIM menjadi keharusan bagi PKBM dalam mengelola program sehingga tidak ada lagi kesalahan perencanaan, strategi pelaksanaan, dan melaporkan hasil kegiatan. Dengan adanya SIM maka program bias berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan pendidikan.

PENUTUP

Simpulan

PKBM sejatinya bertujuan untuk memberikan bekal bagi masyarakat agar dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep PKBM yang mengarah pada pembangunan pendidikan tidak bias terlepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat yang diberikan bekal dapat berdaya dan keluar dari garis kemiskinan. Pada kajian ini, akan diakhiri dengan rangkuman hasil kajian dari beberapa sumber yang kemudian dianalisis. 1) PKBM yang berbasis sumber daya lokal menjadi kekuatan bersama. Masyarakat dengan pengelola PKBM menyatukan visi dan membangun masyarakat yang berendidikan, beretika, dan berdayasaing. 2) pendidikan dan PKBM menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, PKBM hadir untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan dalam kelangsungan hidup dan bagi generasi selanjutnya. Eksistensi PKBM memberikan dampak positif bagi pembangunan pendidikan, bukan hanya PKBM yang berada di pedesaan, di perkotaan pun PKBM masih dianggap perlu. PKBM yang terintegrasi antara pengelolaan sumber daya lokal dengan pembangunan pendidikan harus didukung dengan strategi. Strategi yang tepat digunakan untuk menjaga eksistensi PKBM dengan menggunakan SIM. SIM mendukung keberhasilan program-program PKBM karena dengan adanya SIM maka rancangan program, strategi pelaksanaan program, pelaporan dan pengembangan PKBM dapat dilakukan.

Saran

Berangkat dari hasil kajian literature yang telah dibahas sebelumnya, penulis menemukan beberapa hal yang dapat mendukung PKBM tetap eksis dalam pembangunan pendidikan: 1) sumber daya lokal yang ada disetiap daerah

dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menjadikan PKBM sebagai tempat atau *centre point* kegiatan pengembangan dan 2) PKBM jangan hanya berpangku tangan pada kucuran bantuan dana dari pemerintah, PKBM harus mampu melihat peluang dari swasta dalam keberlangsungan lembaga. Selain itu, PKBM harus memiliki unit usaha sebagai pendukung dana dalam menjalankan Program-program PKBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Iskandar. 2007. *Hambatan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No 068. <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/425/282>. Pada 28 April 2017.
- DIRJEN PAUD-DIKMAS. 2017. *Data jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Indonesia*. <http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/>. Pada 28 April 2017.
- Dwiningrum, S.I.Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadromi. 2017. *The Performance Management of Community Service and Empowerment Through Farmers' Community Learning Centre for Economic Empowerment in Kandri Village, Semarang – Indonesia*. Internasional Journal Advanced Research. Volume 5 Nomor 2.
- Hermawan, Y dan Suryono Y. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapintaran*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Volume 3 Nomor 1.
- Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
- , *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal*. Undang-Undang No 81 Tahun 2013.
- Kamil, Mustofa. 2011. *Pendidikan Nonformal; Pengembangan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Kominkan Jepang)*. Bandung: Alfabeta.
- Kathmandu et al, 2006. *Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal*. Nepal: UNESCO.
- Nurhalim, Khonsum. 2011. *Pendidikan Seumur Hidup*. Semarang: UNNES PRESS.
- Putri, D.N. Nikentari dan Desmawati, Liliek, 2016. *Penyelenggaraan Program Kelompok Belajar Usaha di PKBM Kartika Kabupaten Purbalingga*. Journal Of Nonformal Education. Vol 2 nomor 2.
- Sihombing, Umberto. 2001. *Pendidikan Luar Sekolah; Masalah, Tantangan, dan Peluang*. Jakarta: CV. Wirakarsa.
- . 2000. *Pendidikan Luar Sekolah; Manajemen Strategi*. Jakarta: PD Makhota.
- Stoll, L et al. 2006. *Learning Communities: A Review Of The Literature*. Journal Of Educational Change. Londong: Springer.
- Suryono, Yoyon. 2014. *Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)*. Yogyakarta: UNY Press.
- UNESCO. 2007. *Strengthening Community Learning Centres through Linkages and Networks: A Synthesis of Six Country Reports*. Bangkok: UNESCO.
- Onyenemezu, C. E. 2014. *The imperative of citizen's participation in community development*. Academic research internasional. [http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.5\(1\)/2014\(5.1-22\).pdf](http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.5(1)/2014(5.1-22).pdf). Pada 28 April 2017.
- Zolfaghari, Agung, 2009. *Community Learning Centers Program as an Educational Tool for Community Literacy Development in the Islamic Republic of Iran: Community of Golshan as a Case Study*. Asian Sosial Since. www.ccsenent.org/journal.html. Vol 5 Nomor 8. Pada 28 April 2017.